

Analysis of the Use of Religious Social Assistance Funds Through the Sipanggar Baja Application in Bengkulu Province

Analisis Penggunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan Melalui Aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu

Muhammad Taufieq Tamsie^{a*}, Adityo Pratikno Ramadhan^b, Gushevinalti^c
Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu^{a,b,c}
taufieqtamzie@gmail.com^a

Abstract

This study aims to analyze the use of religious social assistance funds through the Sipanggar Baja application in Bengkulu Province as a form of digital-based public policy innovation. The results show that the implementation of the Sipanggar Baja application has improved the quality of governance, particularly in terms of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency of public services. The system integrates the processes of application submission, verification, and distribution of assistance in a systematic and well-documented manner, thereby facilitating data management and enhancing public access to information. This policy is also in line with the principles of good governance, as it addresses issues found in the previous manual system, such as slow processes, lack of transparency, and a high risk of administrative errors. However, the implementation of the Sipanggar Baja application has not been fully optimal due to several challenges, including low levels of digital literacy among the community, limited access to and quality of internet infrastructure, and technical difficulties in using the application. In addition, technical issues remain, such as system disruptions, a user interface that is not fully user-friendly, and suboptimal information and notification features. The findings also reveal a gap between policy objectives and real-world conditions, caused by uneven readiness of both the community and supporting infrastructure in adopting digital systems. Nevertheless, the public response to the application is generally positive, particularly in terms of ease of access, time efficiency, and improved transparency in the assistance application process. Therefore, optimizing the implementation of the Sipanggar Baja application requires continuous improvements in technology, policy, and human resource capacity.

Keywords: Digital Transformation, Public Services, Religious Social Assistance, Sipanggar Baja, Good Governance, Transparency, Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu sebagai bentuk inovasi kebijakan publik berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sipanggar Baja mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Sistem ini telah mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip good governance karena mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sistem manual, seperti lambatnya proses, kurangnya transparansi, dan tingginya potensi kesalahan administrasi. Namun demikian, implementasi aplikasi Sipanggar Baja belum berjalan optimal akibat beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, serta kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, masih ditemukan permasalahan pada aspek sistem, seperti gangguan teknis, tampilan antarmuka yang kurang ramah pengguna, serta fitur informasi dan notifikasi yang belum optimal. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan akibat belum meratanya kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap aplikasi ini cenderung positif, terutama dalam hal kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi aplikasi Sipanggar Baja memerlukan perbaikan berkelanjutan dari aspek teknologi, kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Bantuan Sosial Keagamaan, Sipanggar Baja, Good Governance, Transparansi, Akuntabilitas.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional yang berperan penting dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kedudukan strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik karena berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah melalui asas otonomi untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan publik. Salah satu urusan penting adalah pelayanan sosial, termasuk bantuan sosial keagamaan yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, solidaritas, dan nilai spiritual masyarakat.

Regulasi pengelolaan bantuan sosial terus diperbarui, mulai dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 hingga Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 24 Tahun 2024, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Bantuan sosial keagamaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga berfungsi memperkuat kohesi sosial dan nilai moral masyarakat (Suryono, 2020). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai masalah seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi, dan potensi penyimpangan anggaran yang dapat menurunkan kepercayaan publik (Kurniawan, 2023).

Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Dwiyanto, 2021). Di Provinsi Bengkulu, sistem manual digantikan dengan aplikasi Sipanggar Baja sejak uji coba 2023 dan implementasi penuh 2024. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas melalui proses elektronik yang terintegrasi.

Aplikasi ini mengharuskan usulan hibah sesuai indikator kinerja dalam RPJMD dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), sehingga belanja hibah menjadi berbasis kinerja. Namun, implementasinya belum optimal karena kendala utama berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kesulitan teknis penggunaan aplikasi.

Hasil wawancara menunjukkan adanya kendala administratif dan teknis, seperti kesalahan unggah dokumen, format tidak sesuai, hingga gangguan sistem. Selain itu, keterbatasan SDM dan kurangnya pelatihan menyebabkan proses verifikasi dan penyaluran menjadi kurang efisien. Dari sisi masyarakat, rendahnya pemahaman teknologi membuat penggunaan aplikasi dianggap lebih rumit dibanding sistem manual.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan SDM, infrastruktur, koordinasi antar perangkat daerah, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial keagamaan masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan.

Penelitian ini berfokus pada dua OPD, yaitu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta BPKD Provinsi Bengkulu, yang memiliki peran strategis dalam proses pengusulan, verifikasi, penganggaran, hingga pencairan bantuan. Kolaborasi kedua instansi ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Sipanggar

Baja merupakan proses lintas organisasi yang menentukan keberhasilan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk menelaah secara komprehensif implementasi kebijakan terkait penerapan aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu. Analisis kebijakan dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, penilaian dampak kebijakan, serta penyusunan rekomendasi bagi pengambil keputusan. Pendekatan ini penting untuk memastikan apakah implementasi aplikasi telah sesuai dengan tujuan awal pengembangannya, yaitu mempercepat penyediaan data kinerja, memperkuat fungsi pengendalian, dan meningkatkan efektivitas evaluasi pembangunan daerah. Melalui analisis kebijakan, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan sistem dapat diidentifikasi secara lebih terstruktur, termasuk tingkat kemudahan penggunaan aplikasi, keterlambatan penginputan data, ketidakjelasan penugasan operator, serta kelemahan regulasi sebagai dasar operasional sistem.

Analisis kebijakan memungkinkan peneliti memahami implementasi Sipanggar Baja sebagai proses yang dipengaruhi oleh kapasitas SDM, literasi digital, dukungan infrastruktur, dan pola koordinasi antar-OPD. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan yang melandasinya memengaruhi tata kelola perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Kerangka analisis ini memberikan dasar untuk melihat hubungan antara desain kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan hasil yang dicapai di lapangan.

Melalui analisis yang sistematis, penelitian ini berupaya menyusun rekomendasi aplikatif, seperti perlunya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi operator melalui pelatihan berkelanjutan, penataan ulang tugas dan tanggung jawab pelaksana, serta perbaikan koordinasi lintas perangkat daerah. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi Sipanggar Baja agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi akademik maupun praktis dalam memperkuat transformasi digital penyaluran bantuan sosial keagamaan di Provinsi Bengkulu serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif** untuk menggali fenomena implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi Sipanggar Baja secara mendalam. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memahami interaksi sosial, makna, dan proses kebijakan secara holistik (Sujarweni, 2014:2; Noor, 2016:108). Pendekatan induktif digunakan dengan menarik kesimpulan umum dari fakta empiris di lapangan (Nazir, 2009).

Menurut Arikunto (2013:3), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi secara apa adanya melalui data yang disajikan dalam bentuk narasi. Dalam konteks ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi aplikasi Sipanggar Baja, termasuk kendala teknis, administratif, dan kelembagaan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada analisis kebijakan penyaluran bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu. Penelitian menitikberatkan pada permasalahan utama seperti rendahnya literasi digital, ketidaklengkapan proposal, serta kendala teknis dan administratif yang memengaruhi proses pengajuan hingga pencairan bantuan.

Selain itu, penelitian juga menganalisis dampak yang mungkin timbul, seperti keterlambatan pencairan dan menurunnya kepercayaan masyarakat (jika tidak ditangani), serta merumuskan solusi melalui perbaikan sistem, peningkatan SDM, penyederhanaan prosedur, dan penguatan koordinasi. Tahapan analisis meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif dalam konteks alami (Creswell, 2016), melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan kendala implementasi (Moleong, 2019; Bungin, 2015). Teknik ini fleksibel, dilakukan langsung atau daring, serta menggunakan pedoman wawancara agar tetap terarah (Creswell, 2016).

2. Observasi

Observasi partisipatif dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti dalam proses penggunaan aplikasi (Bungin, 2015; Sutrisno Hadi, 2016; Spradley, 2016). Fokusnya meliputi alur sistem, interaksi pengguna, kendala teknis, kompetensi SDM, serta sarana prasarana. Metode ini memberikan gambaran nyata tentang efektivitas implementasi dan faktor pendukung maupun penghambat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, regulasi, pedoman teknis, laporan, dan bukti visual (Moleong, 2018; Widodo, 2016). Teknik ini membantu memverifikasi kesesuaian antara regulasi dan praktik serta menilai peran aplikasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial keagamaan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Bantuan Hibah Melalui SIPANGGAR BAJA

Bantuan hibah merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor. Secara umum hibah diartikan sebagai pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga tertentu yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik dan tidak bersifat wajib serta tidak mengikat secara berkelanjutan. Bantuan hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Penggunaan aplikasi Sipanggar Baja juga mendukung prinsip akuntabilitas publik melalui penyediaan data yang terdokumentasi secara digital dan dapat diakses

untuk keperluan pengawasan serta evaluasi. Setiap transaksi dan proses yang terjadi dalam sistem tercatat secara otomatis, sehingga memudahkan auditor maupun pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah. Hal ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan hibah telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyaluran bantuan hibah melalui aplikasi Sipanggar Baja tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan hibah.

Hasil Observasi dan Dokumentasi

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian, peneliti telah melakukan rekapitulasi terhadap capaian pelaksanaan program hibah berupa uang yang dikelola oleh Biro Pemkesra dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2025. Rekapitulasi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan, efektivitas, serta realisasi program hibah yang telah dilaksanakan. Data yang dihimpun tidak hanya mencerminkan jumlah dan distribusi bantuan, tetapi juga memberikan informasi terkait dinamika pelaksanaan program dari waktu ke waktu, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja program serta perumusan kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang. Seperti gambar dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Masjid/Rumah Ibadah Lainnya yang menerima hibah dari Tahun 2020-2025

No	Tahun	Daftar Penerima Hibah	Lokasi
1	2020	150 Rumah Ibadah	Provinsi Bengkulu
2	2021	175 Rumah Ibadah	Provinsi Bengkulu
3	2022	250 Rumah Ibadah	Provinsi Bengkulu
4	2023	271 Rumah Ibadah	Provinsi Bengkulu
5	2024	125 Rumah Ibadah	Provinsi Bengkulu

Sumber: Dokumentasi Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian, terlihat bahwa implementasi aplikasi Sipanggar Baja sebagai sistem digital dalam pengelolaan bantuan hibah keagamaan di Provinsi Bengkulu telah membawa perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang masih bersifat manual. Transformasi ini tidak hanya mengubah pola kerja pemerintah, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat dalam mengakses layanan publik. Secara umum sebelum adanya aplikasi, proses pengajuan hibah cenderung memakan waktu, membutuhkan interaksi langsung, serta memiliki keterbatasan dalam hal transparansi dan pelacakan proses. Masyarakat harus datang ke kantor, membawa dokumen fisik, dan seringkali mengalami kendala administratif seperti ketidaklengkapan berkas yang mengharuskan mereka melakukan kunjungan berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manual belum sepenuhnya efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah diterapkannya aplikasi Sipanggar Baja, terdapat perubahan ke arah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara digital, sehingga secara konseptual mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat mulai merasakan manfaat berupa kemudahan akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor, serta adanya fitur pemantauan status pengajuan yang memberikan gambaran terhadap perkembangan proses. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa implementasi sistem ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, terutama dari sisi pengguna (masyarakat). Tingkat literasi digital yang belum merata menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut, mengalami kesulitan dalam memahami alur penggunaan, pengisian data, hingga proses unggah dokumen. Kendala teknis seperti kualitas jaringan internet yang tidak stabil, sistem aplikasi yang terkadang lambat atau mengalami gangguan, serta kurangnya kejelasan informasi dalam aplikasi turut memengaruhi pengalaman pengguna. Bahasa yang digunakan dalam sistem masih dianggap cukup teknis dan belum sepenuhnya komunikatif, sehingga menimbulkan kebingungan, terutama ketika terjadi perubahan status atau permintaan perbaikan dokumen.

Hasil Observasi lainnya juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kesiapan antara masyarakat yang telah terbiasa menggunakan teknologi dengan masyarakat yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama. Terlihat bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki sikap yang cukup terbuka terhadap inovasi digital ini. Mereka menyadari potensi aplikasi dalam mempermudah proses pengajuan bantuan di masa depan. Namun, penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan aplikasi, kejelasan informasi, serta adanya dukungan berupa pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah.

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa aplikasi Sipanggar Baja telah memberikan kontribusi positif dalam modernisasi pelayanan publik, tetapi masih memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kualitas sistem agar lebih stabil dan ramah pengguna, penyederhanaan bahasa dan alur penggunaan, serta penguatan literasi digital masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

Pembahasan

Pada Pembahasan kali ini peneliti akan membahas mengenai Analisis kebijakan Publik terkait penggunaan dana bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi sipanggar baja di provinsi bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, implementasi aplikasi Sipanggar Baja dapat dianalisis sebagai suatu kebijakan publik yang berorientasi pada transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial keagamaan. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas berbagai permasalahan yang selama ini melekat pada sistem manual, seperti proses administrasi yang berbelit, keterbatasan transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta tingginya potensi keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, kehadiran Sipanggar

Baja mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pelayanan publik yang lebih modern, adaptif, dan berbasis teknologi informasi.

Dari perspektif kebijakan, pengembangan Sipanggar Baja menunjukkan adanya kesesuaian antara masalah kebijakan dengan solusi yang ditawarkan. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan hibah terletak pada lemahnya sistem administrasi dan pengawasan, sehingga diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan proses secara digital. Dalam hal ini, Sipanggar Baja dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian apabila dianalisis lebih lanjut pada tahap implementasi kebijakan, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh kesiapan implementasi. Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi Sipanggar Baja adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Sebagian besar masyarakat, khususnya pada kelompok usia lanjut atau yang berada di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan aplikasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis teknologi belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kesiapan sosial masyarakat sebagai pengguna utama layanan.

Selain faktor literasi digital aspek infrastruktur juga menjadi variabel penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses jaringan internet masih menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sipanggar Baja. Ketimpangan infrastruktur ini berpotensi menciptakan kesenjangan akses layanan antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks analisis kebijakan, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan digitalisasi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem aplikasi, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur pendukung yang merata dan berkelanjutan.

Dari sisi desain kebijakan aplikasi Sipanggar Baja masih menghadapi tantangan dalam aspek kemudahan penggunaan. Antarmuka yang belum sepenuhnya sederhana, penggunaan istilah yang cenderung teknis, serta minimnya fitur penjelasan yang komunikatif menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memahami alur penggunaan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan, yaitu pendekatan yang menempatkan kebutuhan dan kemampuan pengguna sebagai prioritas utama. Dalam konteks pelayanan publik, aspek kemudahan penggunaan menjadi sangat penting, karena menentukan tingkat penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan di masyarakat.

Implementasi Sipanggar Baja menunjukkan adanya peran penting dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Perangkat daerah, seperti Biro Pemkesra dan BPKD, berperan sebagai pelaksana utama kebijakan, sementara masyarakat berperan sebagai pengguna layanan. Di sisi lain, keberadaan aktor informal seperti pemuda, perangkat desa, dan individu yang memiliki kemampuan digital turut menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aktor formal, tetapi juga oleh jaringan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena

itu, pelibatan aktor lokal sebagai bagian dari strategi implementasi dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam meningkatkan keberhasilan kebijakan.

Dalam hal proses implementasi dapat dilihat bahwa Sipanggar Baja telah membawa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan mekanisme manual. Sistem digital memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Selain itu, adanya fitur pelacakan status pengajuan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan transparansi pelayanan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur tersebut belum sepenuhnya optimal, karena informasi yang disajikan masih sulit dipahami oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi yang dihadirkan masih bersifat administratif, belum sepenuhnya komunikatif dan informatif bagi pengguna.

Dari sisi evaluasi kebijakan efektivitas implementasi Sipanggar Baja dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti kecepatan proses, ketepatan sasaran, kelengkapan data, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, aplikasi ini telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sistem manual, terutama dalam hal dokumentasi dan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi capaian kinerja, seperti kesalahan input data, ketidaksesuaian dokumen, serta keterlambatan dalam proses verifikasi akibat perlunya klarifikasi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah terintegrasi secara digital, kualitas output masih sangat bergantung pada kualitas input dan kapasitas pengguna.

Dari perspektif dampak kebijakan implementasi Sipanggar Baja telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, serta pengurangan beban administrasi. Masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor untuk mengajukan bantuan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, sistem digital juga mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi secara optimal, sehingga berpotensi tertinggal dalam memperoleh layanan.

Kebijakan Sipanggar Baja juga dapat dilihat sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari perubahan budaya kerja birokrasi dan pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi digital menuntut adanya perubahan paradigma, dari pelayanan yang bersifat administratif menjadi pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Sipanggar Baja memerlukan dukungan perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan implementasi Sipanggar Baja telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, optimalisasi kebijakan masih memerlukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat multidimensional. Dari aspek teknologi, diperlukan penyempurnaan sistem agar lebih stabil, cepat, dan mudah digunakan. Dari aspek kebijakan, diperlukan penguatan regulasi dan SOP yang lebih jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, dari aspek sumber daya

manusia, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan.

Implementasi Sipanggar Baja menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga proses sosial yang melibatkan adaptasi, pembelajaran, dan perubahan perilaku. Masyarakat sebagai pengguna layanan memerlukan waktu dan dukungan untuk dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan empatik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia sistem, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam proses adaptasi tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis penggunaan dana bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi sipanggar baja di provinsi Bengkulu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital ini merupakan bentuk inovasi kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Aplikasi Sipanggar Baja telah mampu mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaan data serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip *good governance*, karena mampu menjawab permasalahan yang sebelumnya muncul dalam sistem manual, seperti proses yang lambat, kurang transparan, serta tingginya potensi kesalahan administrasi. Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, aplikasi ini terbukti mendukung peningkatan akuntabilitas fiskal dan mempermudah proses monitoring serta evaluasi penyaluran bantuan sosial keagamaan. Namun dalam tahap implementasi masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Sipanggar Baja. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, serta masih adanya kesulitan dalam penggunaan aplikasi, baik dari segi pengisian data, unggah dokumen, maupun pemahaman terhadap informasi yang disajikan dalam sistem. Selain itu, dari sisi teknis, masih ditemukan gangguan sistem, tampilan antarmuka yang belum sepenuhnya ramah pengguna, serta belum optimalnya fitur informasi dan notifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh belum meratanya kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung dalam mengadopsi sistem digital. Meskipun demikian, secara umum masyarakat memberikan respons positif terhadap keberadaan aplikasi ini, terutama dalam hal kemudahan akses, efisiensi waktu, serta peningkatan transparansi proses pengajuan bantuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sipanggar Baja memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Akan tetapi, optimalisasi implementasinya masih memerlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, baik dari aspek teknologi, kebijakan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi aplikasi Sipanggar Baja adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi Sipanggar Baja melalui berbagai media dan metode yang mudah dipahami. Kegiatan pelatihan dan pendampingan secara langsung, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital, sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

Kedua, diperlukan pengembangan dan penyempurnaan sistem aplikasi agar lebih ramah pengguna, dengan menyederhanakan tampilan antarmuka, memperjelas alur penggunaan, serta menyediakan fitur bantuan seperti panduan interaktif, notifikasi otomatis, dan informasi status pengajuan yang lebih komunikatif dan mudah dipahami.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam hal pemerataan akses jaringan internet, agar seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dapat mengakses layanan digital secara optimal tanpa hambatan teknis yang signifikan.

Keempat, peningkatan kualitas dan integrasi data menjadi hal yang penting untuk dilakukan, melalui penerapan sistem validasi otomatis serta integrasi dengan database lain yang relevan, guna meminimalisir kesalahan input data serta meningkatkan akurasi dan keandalan informasi dalam sistem.

Kelima, diperlukan penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah guna memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

Keenam, pemerintah juga disarankan untuk menyediakan layanan bantuan teknis yang responsif serta melibatkan peran masyarakat lokal, seperti perangkat desa atau relawan digital, dalam mendampingi pengguna aplikasi di tingkat akar rumput.

Ketujuh, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan program pelatihan dan workshop secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi masyarakat sebagai pengguna maupun bagi aparatur pemerintah sebagai pengelola aplikasi. Pelatihan dan workshop tersebut hendaknya dirancang secara aplikatif dengan pendekatan praktik langsung, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengoperasikan aplikasi Sipanggar Baja secara mandiri.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal, sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Asmad. (2015). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, Universitas Lampung.
- Barke r, W. C., Jo hnso n, G. C., Hunt, L. T., Ge o rge, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar do mains in diffe rent pro te ins: de tectio n and significance. *Tanpakushitsu*

- Kakusan Ko so. Pro te in, Nucle ic Acid, E nzyme*, 29 Suppl, 54–68.
- Hando yo, E., Ilmu, F., Unive rsitas, S., Se marang, N., Hando yo, E., & Karya, W. (n.d.). *Ke bijakan Publik*.
- Hukum, J., Justitia, M., Hukum, F., & Suryakencana, U. (2020). *No i Title*. 6(1).
- Publik, K., William, V., & Analisis, D. (2023). *DAN IMPL E ME NTASI PUBLIC PO LICY BY WILLIAM DUNN : ANALYSIS AND*. 1(1), 1–9.
- Safitri, I., Marsidin, S., Subandi, A., Padang, U. N., & Barat, S. (2020). *Analisis Ke bijakan te rkait Ke bijakan Lite rasi Digital di Se kolah Dasar*. 2(2), 176–180. <https://do.i.o.rg/10.31004/edukatif.v2i2.123>
- Dwiyanto, A. (2021). *Re formasi Biro kras i dan Pe layanan Publik di Era Digital*. Yo gyakarta: Gadjah Mada Unive rsity Pre ss.
- Patto n, C. V., & Sawicki, D. S. (2016). *Basic me tho ds of po licy analysis and planning* (3rd e d.). Ne w Yo rk: Ro utle dge.
- Indrajit, R. E. (2022). *Transfo rmas i Digital Pe me rintahan: Ko nsep dan Praktik E-Go ve rnme nt di Indo nes ia*. Jakarta: Mitra Wacana Me dia.
- Be rg, B. L. (2001). *Qualitative Re se arch Me tho ds for the So cial Scie nce s* (4th e d.). Bo sto n: Allyn & Baco n
- Ke me nte rian Dalam Ne ge ri. (2021). *Pe do man Umum Pe nyaluran dan Pe rtanggungjawaban Bantua n So sial Ke agamaan Pe me rintah Dae rah*. Jakarta: Dire kto rat Je nde ral Bina Ke sra.
- Kurniawan, A. (2023). *Tantangan Digitalisasi Ke bijakan Publik di Pe me rintah Dae rah*. Bandung: Alfab e ta.
- Pe raturan Gube rnur No mo r 38 Tahun 2021 te ntang Tata Cara Pe nganggaran, Pe laksana an, Pe natausaha an, Pe rtanggungjawaban, dan Pe lapo ran se rta Mo nito ring dan E valuasi Be lanja Hibah Uang/Barang
- Pe rme ndagri No mo r 77 Tahun 2020 te ntang Pe do man Te knis Ke uangan Dae rah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu. 2026. Dokumentasi Struktur Organisasi dan Data Internal Biro Pemerintahan dan Kesra. Bengkulu: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Bengkulu.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1968. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Pembentukan Provinsi Bengkulu. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2026. Aplikasi Sistem Informasi Penganggaran Belanja Hibah (Sipanggar Baja). Diakses dari: <https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/>

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. 2026. Data dan Informasi Pengelolaan Anggaran Hibah Daerah. Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Bengkulu.